PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK

(Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)¹

Oleh: Vially Rawis²

ABSTRAK

Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Kepala Desa berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep yang di gunakan Kepala Desa Pontak dalam pelayanan publik. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Kepala Desa dalam pelayanan public di desa Pontak memang karena sudah menjadi niat dan tekat dari kepala desa untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Kata kunci: Peranan, Kepala Desa, dan Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Latar belakang

Peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan public menjadi lebih baik dari cara-cara sebelumnya, bahwa paradigma pelayanan public dirubah dari "dilayani "menjadi "melayani ". Sikap Kepala desa yang bersifat ingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk pada peran kepala desa dalam pelayanan public, kepala desa cenderung korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa. Kenyataan ini bukan rahasia lagi, masyarakat pada umumnya telah mengetahui dan memahami bahwa kegagalan pembangunan nasional diakibatkan oleh korupsi, kolusi dan nepotisme telah menghambat tujuan pelayanan public mencapai masyarakat yang sejahtera adil dan makmur., sehingga kepala desa dalam pelayanan public harus melayani masyarakat dan bukan untuk dilayani yang menjadi harapan masyarakat pada era reformasi ini.

Isu yang berkembang saat ini sejak reformasi 1998 sampai sekarang bahwa peranan kepala desa dalam pelayanaan public pada umumnya tidak berjalan sebagai mestinya sesuai dengan harapan masyarakat. Sikap kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih tetap ingin dilayani oleh masyarakatnya dan belum secara prima melayani kepentingan masyarakat, sehingga peran kepala desa cenderung menghambat pembangunan desa. Seharusnya peranan kepala desa sebagai mesin penggerak utama, dan yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan desa dalam mencapai kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari pelayanan

_

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa jurusan ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

public. Masalah ini menjadi masalah nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga menarik minat saya melakukan penelitian ini untuk mendalami masalahnya dan melakukan pembahasan untuk menemukan jalan keluar sebagai langkah memecahkan masalah dengan pendekatan teori ilmu pemerintahan. Bahwa telah diketahui pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Minahasa selatan belum mencapai harapan masyarakat desa, kepala desa dipandang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam memberikan pelayanan public. Akibatnya kepentingan umum pada kenyataanya terbengkalai, sarana dan prasarana pelayanan umum kurang lengkap dan bahkan tidak tersedia, pelayanan administrasi pemerintahan desa lamban dan berbelit-belit. Sehingga berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menuju tujuan Negara Republik Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur.

Yang menarik perhatian saya sehingga melakukan penelitian ini adalah pandangan masyarakat atau issue tersebut berbeda dengan pandangan masyarakat terhadap kepala desa Pontak dikampung saya. Kepala desa Pontak, Hukum Tua bernama Meity Anita Rawis dinilai berhasil oleh masyarakat desa pontak dan pemerintah kabupaten Minahasa selatan khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Berkaitan dengan maksud tersebut maka penelitian ini berjudul: *Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Metode pendekatan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Djam'an Satori, 2011).

Fokus dalam penelitian ini adalah peranan kepala desa dalam pelayanan publik. Peran kepala desa dipandang sebagai suatu kewajiban formal yang ditunjukkan oleh wewenang dan tanggung-jawab kepala desa, berbentuk tugas dan fungsi pemerintah melayani masyarakat adalah pelayanan public, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan.

Sumber data penelitian, sebagai instrument kunci adalah saya sendiri, berbaur dengan masyarakat dalam melakukan observasi, unsur informan adalah Kepala desa dan staf secretariat desa Pontak dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat serta dokumen-dokumen.

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan kepala desa dalam penelitian ini dipandang sebagai peranan formal yang harus dilaksakan oleh kepala desa melayani kepentingan public didesa, pengertian peranan kepala desa dimaknai sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai wewenang kepala desa berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Kewenangan kepala desa berperan dalam pelayanan public diperoleh atas perintah undang-undang, Nurcholis Hanif, (2011).

Kewenangan kepala desa dalam pelayanan public berhubungan dengan pelaksanaan tujuan pemberian otonomi desa, yang diserahkan oleh Negara melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.Kemudian dalam perkembangan pelaksanaan pemerintahan desa pada tahun 2014 pemerintah pusat menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bahwa prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti kepala desa diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, sehingga memiliki kewenganganuntuk memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan otonomi,prinsip otonomi dilakukan secara nyata dan bertanggung-jawab, yang dimaksud nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajibanyang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang. Yang dimaksud otonomi yang bertanggung-jawab adalah dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. Kewenangan kepala desa diperoleh dari rakyat melalui pemilihan kepala desa, dalam arti kepala desa terpilih mendapat kepercayaan warga untuk memimpin dan melaksanakan hak otonomi desa yaitu hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri diserahkan kepada kepala desa, sehingga tanggung-jawab tujuan otonomi berada dipundak kepala desa sebagai pemimpin desa selama enam tahun periode masa jabatan.

PEMBAHASAN

Peranan kepala desa Pontak dalam pelayanan public untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Pontak, telah disusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) Tahun 2013 – 2018 dan rencana kerja pembanguan desa (RKPDes) Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa naskah rencana ini dirangkum berdasarkan partisipasi masyarakat, demokratis, keanakaraman, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat, menjadi rencana pembangunan strategis desa Pontak selama 5 tahun dan dijabarkan setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Hasil penelitian menunjukan pembangunan desa Pontak periode lima tahun kedepan (2013 – 2018) dengan visi sebagai berikut: "Untuk mewujudkan desa Pontak yang mandiri, religious, bermasyarakat, kreatif, inovatif-motivator, dan berdaya saing" Kemudian dijelaskan sebagai berikut:

- Desa yang mandiri berbasis pertanian adalah mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan local dibidang pertanian secara luas.
- Adapun yang dimaksud dengan masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta mampu memanfaatkannya secara tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- Yang dimaksud dengan masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka disusun misi desa Pontak sebagai berikut :

- Meningkatkan sarana dan prasana pertanian
- Pengembangan agribisnis berbasis kelompok
- Meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pendidikan
- Meningkatkan pelayanan masyarakat
- Pengembangan ekonomi masyarakat

- Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah.

Visi dan misi desa Pontak tersebut diatas mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 berkesinambungan tercermin pada rencana kerja pembanguan setiap tahun sampai dengan tahun 2015 ini. Dalam RKPDes desa Pontak Tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebesar Rp 689.889.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Sumber pendapatan Desa Pontak Tahun 2015 sebagai berikut :

Pendapatan Asli Desa
Dana Perimbangan (ADD)
Bantuan Pusat, Prop dan Kab
Dana Desa
Lain-lain
Jumlah
Rp 229.189.000, Rp 38.560.000, Rp 167.700.000, Rp 244.440.000, Rp 10.000.000, Rp 689.889.000,-

Belanja Desa Pontak Tahun 2015 sebagai berikut :

Penyelenggaraan pemerintah desa : Rp 206.966.700, Pembangunan desa : RP 344. 950.880, Pembinaan warga : Rp 5.328.500, Pemberdayaan Masyarakat : RP 132.642.920, JUmlah : RP 689.889.000,-

Hasil penelitian menunjukan bahwa sarana dan prasarana atau barang public yang tersedia didesa Pontak sudah cukup memadai dan lengkap, digunakan oleh warga desa dalm meningkatkan kesejahteraan. Tersedianya barang-barang public itu atas peranan kepada desa Pontak Meity Anita Rawis yang ingin membangun desanya dimulai sejak sebalum dia terpilih sebagai kepala desa Pontak. Dan lebih giat lagi membangun desanya setelah dia terpilih sebagi kepala desa Pontak.

Dengan adanya bukti nyata pembangunan yang dibangun bersama warga desa yang dipimpinnya dalah peran menjalahkan tugas pelayanan public, hukum tua Meity Anita Rawis dinilai berhasil oleh warga desa Pontak. Di desa Pontak telah tersedia gedung kantor kepala desa yang megah dan luas, perabot dan alat administrasi kantor yang lengkap serta staf yang siap melayani masyarkat. Pelayanan surat menyurat terhadap warga masyarakat berlangsung cepat dan tepat tanpa pandang bulu, tidak pernah diperlambat, transparan dan bertanggung-jawab.

Telah tersedia barang public balai desa, jalan desa rapi bersih, lapangan olah-raga, jalan pertanian, gereja-gereja, pemakaman umum, sumur air umum, taman desa, kolam ikan desa, kebun desa, koperasi desa, pasar desa.

Menurut kepala desa Pontak hukum tua Meity Anita Rawis, keberhasilan pemerintahan demokrasi ditentukan oleh adanya keinginan untuk mewujudkan kepentingan bersama telah menjadi niat dan tekad sebelum terpilih sebagai pemerintah. Setelah terpilih bulatkan niat dan tekad kita dan bertindak sebagai pemerintah terbaik pilihan rakyat. (pendapat ini diolah dari hasil wawancara mendalam dengan hukum tua Meity Anita Rawis). Dia mengatakan tidak ada yang sulit dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa, bahwa sebenarnya semua potensi untuk diberdayakan tersedia ada, ingin berhasil dipastikan tercapai, tergantung pada kesungguhan hati sebagai kepala desa yang diberi kepercayaan rakyat untuk memimpin mereka.

Dengan adanya kesungguhan kita dan ada bukti hasil kinerja bagi kepentingan rakyat, dipastikan rakyat melaksanakan apa yang kita perintahkan.

Kebenaran terbukti, Drs, G. S. J Saroinsong sebagai informan kunci dalam penelitian ini, mengatakaan bahwa: memang Meity Anita Rawis sebelum terpilih sebagai kepala desa, dia penyumbang terbesar pembangunan gereja-gereja, jalan perkebunan, gapura, dan sering membantu warga desa Pontak yang mengalami kesulitan ekonomi dengan cara yang saling menguntungkan. Dia memang orang baik, cerdas dan rajin, desa kami menjadi maju dan berhasil, oleh sebap itu dia dipilih sebagai kepala desa.

Selanjutnya Drs.G.S.J Saroinsong menjelaskan, Bupati Minahasa Selatan pada kunjungan kerjanya, mengatakan bahwa hanya kantor desa Pontak yang terlengkap sarana dan prasarana administrasi dan dengan pelayanan administrasi yang lancar cepat dan tepat di Kabupaten Minahas Selatan. Juga laporan pertanggung-jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa tiap tahun dinilai baik, diterimah oleh BPD dan masyarakat, bersih dan tidak pernah terdapat kasus KKN.

Berdasarkan observasi langsung dilokasi penelitian dan hasil wawancara yang mendalam, dan deskripsi peranan kepala desa dalam pelayanan public dinilai berhasil, ditunjukan oleh bukti nyata ada pembangunan infrasruktur untuk melayani kepentingan public, maka dimukan melalui penelitian ini bahwa "niat dan tekad sebelum" yang menjadi dasar keberhasilan kepala desa Pontak hukum tua Meity Anita Rawis yang menentukan berhasil tidaknya kepala desa dalam pelayanan public. Dengan demikian penelitian ini menemukan konsep "niat dan tekad sebelum", konsep ini dapat digunakan untuk mengukur calon kepala yang layak dipilih, dapat mewujudkan harapan kepentingan bersama.

PENUTUP

Keberhasilan kepala desa dalam pelayanan public dapat ditentukan atau diukur oleh ada tidaknya niat dan tekad mewujudkan kepentingan bersama telah ada sebelum terpilih sebagai kepala desa, indikatornya bukti nyata sebelumnya penyumbang dan penggerak kepentingan bersama, orang baik, cerdas dan rajin. Dan saran dari penulis, **Gunakan** konsep "**niat dan tekad sebelum**" untuk mengukur calon kepala desa yang akan dipilih, dapat diharapkan berhasil dalam melayani kepentingan bersama jika dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-ruzz Media, Jokyakarta.

Carlton, dkk, 1993, *Ilmu Politik*, Rajawali Pers, Jakarta

Erwan Agus Purwanto, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah Sosial*, Gava Media, Jokyakarta.

Inu Kencana, 2009, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Rafika Aditama, Bandung.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Rosda Karya Bandung.

Milles A. dan Houberman, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Gramedia Utama, Jakarta.

Moleong L, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Munasef, 1985, Sistem Pemerintahan Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.

Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.

Sadu Wastiono, dkk, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan*, Fokusmedia, Bandung.

Satori Djam'an, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Taliziduhu Ndraha, 1985, Peranan Administrasi Pemerintahan Desa, IIP, Jakarta.

-----, 1983, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945 hasil amandemen, 2010, Permata, Jakarta.

Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah, 2010, Citra Wacana, Jakarta.

Himpunan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Desa, 2011, Fokusmedia, Bandung.